

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021

Cerol Yohana Sitopu¹, Yunita Nainggolan², Mariska Simanjorang³,Maxwel Hedwilliams Manalu⁴, Lavenia Maharani⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio, Bandung

E-mail: cerol.sitopu@student.uhn.ac.id¹, yunita.nainggolan@student.uhn.ac.id²,
mariska.simanjorang@student.uhn.ac.id³, maxwel.manalu@student.uhn.ac.id⁴,
laveniamaharaniii@gmail.com⁵

Article History:

Received: 10 Juni 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal*

Abstract: *Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan primer daerah, dana distribusi umum dan dana khusus terhadap distribusi belanja daerah baik secara simultan maupun parsial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021. Penggunaan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penggunaan variabel dependennya ialah variabel Belanja Modal Analisis data menggunakan software pengujian hipotesis klasik menggunakan SPSS 22 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi dilaksanakan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, daerah berwenang memungut pajak/kompensasi dan mengelola sumber daya alam (SDA) berdasarkan prinsip desentralisasi. Sumber pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (dana bagi hasil, dana distribusi umum, dan dana khusus) dan pinjaman daerah, desentralisasi, dan tugas bantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD dan sisanya dikelola oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah (Halim: 2007).

Tujuan utama penyeimbangan pemerintahan daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara negara bagian dan pemerintah daerah serta untuk menjamin tingkat pelayanan publik. Perimbangan aset negara tidak boleh membuat pemerintah bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemerintah daerah terpaksa memaksimalkan peluang daerah untuk menciptakan sumber keuangan sendiri dengan meningkatkan pendapatan utama daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pendanaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan utama daerah mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah tersebut. Semakin tinggi porsi PAD dalam APBD, maka

semakin rendah ketergantungan terhadap dukungan pemerintah. Dalam menentukan pertumbuhan kemandirian daerah, pendapatan primer daerah dapat dijadikan tolak ukur, karena pendapatan primer daerah itu sendiri merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana daerah membiayai kegiatannya semata-mata dengan komponen pendapatan yang dihasilkan seluruh daerah (Darwanis). , 2014) Permasalahan penyaluran dana Alokasi dana umum dan khusus disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara kantor negara dan daerah. Di bagian tengah, DAU dan DAK digunakan sebagai ukuran ketimpangan horizontal.

Berdasarkan wilayah, DAU dan DAK bertujuan untuk mendukung kecukupan pendanaan daerah. Permasalahan muncul ketika daerah mengajukan DAU dan DAK yang jumlahnya besar atau memenuhi kebutuhan pendanaan daerahnya. Di sisi lain, pengalokasian DAU dan DAK didasarkan pada kebutuhan daerah, karena dasar penghitungan kebutuhan perpajakan tidak mencukupi (data terbatas, tidak ada standar pelayanan minimal tiap daerah, dan sistem anggaran tidak berbasis biaya. .standar analisis). Selain itu, belanja anggaran secara umum khususnya APBD masih belum mencerminkan kebutuhan riil dan membuat penggunaan DAU dan DAK tidak efektif. Berdasarkan data diketahui nilai reksa dana sebesar 2.713.750.553 (ribu rupee) pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.713.750.553 (ribu rupee) pada tahun 2020 dan 2.545.202 ribu rupee pada tahun 2021. Besaran Dana Properti Khusus pada tahun 2019 sebesar 4.205.592.917, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 4.471.712.532 yaitu sebesar 4.449.135.664. adalah 61,27, 2020, 2020, 592, 532, 2020, 2020, 2020, 532, 532, 2020, 2020, 532, 532.021 bertambah 5.991.151.366. Investasi pada tahun 2019 sebesar 1,249,600,484 euro pada tahun 2020, menurun sebesar 1,796,373,283 euro pada tahun 2021 dan meningkat sebesar 1,145.55. Terlihat dari tahun 2019-2021 DAU, DAK, PAD dan belanja modal kabupaten/kota di Sumut setiap tahunnya bervariasi, terlihat juga investasi yang lebih besar dibandingkan DAU, DAK, PAD sehingga Dapat diartikan bahwa penanaman Modal Utara di Sumatera dibiayai oleh DAU, DAK, PAD, dan juga APBN, karena APBN tidak hanya mentransfer dana dalam bentuk DAK, DAU, tetapi juga dalam bentuk dana bagi hasil. melihat juga bahwa tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, namun nyatanya setelah pemekaran masih terdapat jalan rusak di Sumut seperti Medan ke Sangatta, Medan ke Bontang, Medan Balik Papan. , serta jalan di wilayah pedalaman Sumut, seperti Kabupaten Kutai Barat, yang masih berlubang dan tanah liat. dan di wilayah Kutai Barat khususnya wilayah Muara Pahu listrik masih sedikit, listrik hanya menyala pada malam hari. Dan juga banyak jalan di kota Medan yang masih rusak dan kota Medan masih sering terjadi banjir.

METODE PENELITIAN

Ringkasan laporan pelaksanaan APBD memberikan informasi mengenai besaran anggaran umum, anggaran khusus, pendapatan awal daerah, dan belanja modal. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran data variabel-variabel yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketimpangan varians sisa pengamatan pada model regresi. Jika varians dari sisa pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut Hetesoskedastisitas, dan jika bervariasi disebut Hetesoskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan perancu periode t dengan kesalahan perancu periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang berurutan dalam waktu ke waktu saling berkaitan (Ghozali 2013:110). Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasinya antara nol sampai satu. Uji F-statistik pada

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel terikat atau bebas dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat/terkait. Hipotesis nol yang akan diuji (H_0) adalah apakah semua parameter model bernilai nol. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi level 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi Persamaan:

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan

Dependent Variable: BM
Method: Least Squares
Date: 01/11/24 Time: 00:41
Sample: 2016 2021
Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.41517	12.68159	1.373265	0.3034
PA	1.561218	0.851933	1.832560	0.2083
DAU	2.352935	0.795993	2.955973	0.0979
DAK	-3.723686	1.615107	-2.305535	0.1476
R-squared	0.842296	Mean dependent var		21.06727
Adjusted R-squared	0.605739	S.D. dependent var		0.255854
S.E. of regression	0.160651	Akaike info criterion		-0.584443
Sum squared resid	0.051618	Schwarz criterion		-0.723270
Log likelihood	5.753328	Hannan-Quinn criter.		-1.140178
F-statistic	3.560657	Durbin-Watson stat		2.028373
Prob(F-statistic)	0.226969			

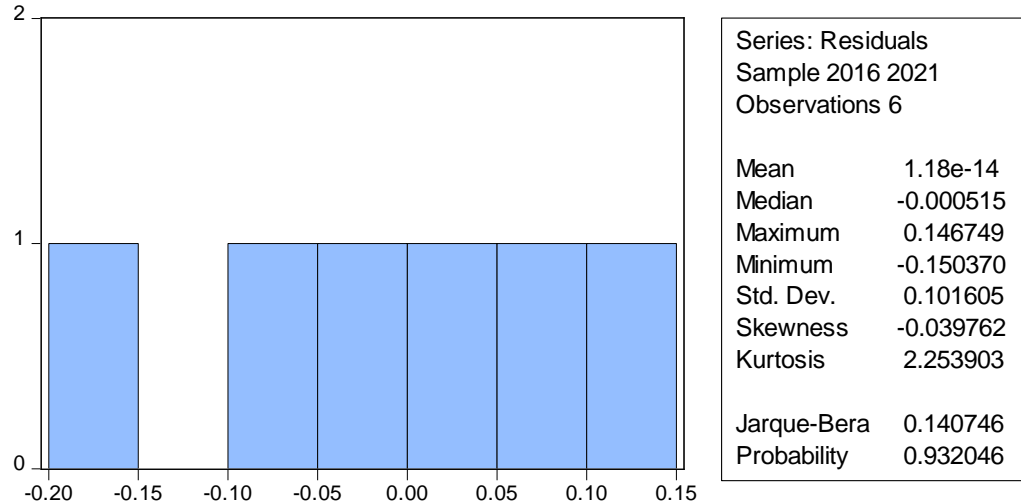
Berdasarkan pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan linier berganda (*Multiple Linear Regression*) maka hasil persamaan regresi data time series sebagai berikut:

$$PESU_{it} = 17.41517 + 1.561218PA + 2.352935DAU - 3.723686DAK$$

Hasil persamaan dengan data time series di atas menunjukn bahwa variabel Alokasi Belanja Daerah memiliki nilai konstan sebesar 17.41517 yang berarti apabila variabel independen lain nilai tetap (konstan) maka secara rata-rata akan terjadi kenaikan Belanja Daerah sebesar 17.41517. Dasar dari pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan antara nilai P-value dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Nilai koefisien pada variabel pendapatan asli daerah yaitu 1.561218 dan nilai probabilitas sebesar 0.2083 > 0.05. Maka hal ini berarti jika pendapatan asli daerah naik sebesar satu juta rupiah maka akan meningkatkan alokasi belanja daerah dengan asumsi bahwa DAU DAN DAK dianggap konstan. Nilai koefisien pada variabel Dana alokasi umum (DAU) yaitu 2.352935 dan nilai probabilitasnya 0.0979 > 0.05. dan Nilai koefisien pada variable Dana Alokasi Khusus (DAK) Yaitu -3.723686 dan nilai probabilitasnya 0.1476 > 0.05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Data berdistribusi normal karena Probability di atas 0,05 yaitu 0.932046.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 01/11/24 Time: 00:44
Sample: 2016 2021
Included observations: 6

Variable	Coefficient		VIF
	Uncentered	Centered	
	Variance	VIF	VIF
C	160.8227	37387.90	NA
PA	0.725789	85218.44	3.220990
DAU	0.633605	68810.78	5.185688
DAK	2.608571	296150.8	9.426773

Tidak ada masalah multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.148947	Prob. F(3,2)	0.4966
Obs*R-squared	3.796888	Prob. Chi-Square(3)	0.2842
Scaled explained SS	1.289999	Prob. Chi-Square(3)	0.7315

Test Equation:
 Dependent Variable: ARESID
 Method: Least Squares
 Date: 01/11/24 Time: 00:44
 Sample: 2016 2021
 Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.760842	4.676687	0.162688	0.8857
PA	-0.341228	0.314174	-1.086112	0.3909
DAU	0.217775	0.293545	0.741882	0.5355
DAK	0.102925	0.595615	0.172804	0.8787
R-squared	0.632815	Mean dependent var		0.073598
Adjusted R-squared	0.082037	S.D. dependent var		0.061835
S.E. of regression	0.059245	Akaike info criterion		-2.579565
Sum squared resid	0.007020	Schwarz criterion		-2.718392
Log likelihood	11.73869	Hannan-Quinn criter.		-3.135301
F-statistic	1.148947	Durbin-Watson stat		3.238496
Prob(F-statistic)	0.496598			

Berdasarkan temuan uji Glejser untuk heteroskedastisitas, nilai probabilitas untuk variable pendapatan asli daerah(PA) sebesar 0.3909 nilai probabilitas untuk Dana alokasi umum (DAU) sebesar 0.5355 dan nilai probabilitas untuk Dana alokasi khusus sebesar 0.8787. karena salah satu nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

KESIMPULAN

Pendapatan Awal Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai hubungan yang positif dan positif terhadap keuangan. berdampak signifikan terhadap distribusi belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2021 pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Sebagian hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dana bantuan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran biaya daerah di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Sebagian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana keuangan khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sebaran belanja daerah di provinsi Sumut pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Dana Pembangunan Umum (DAU) Provinsi Sumut mempunyai peran yang lebih besar dalam meningkatkan belanja modal dibandingkan Pendapatan Primer Daerah (PAD).

DAFTAR REFERENSI

- Aswati, V. H. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.
- Darwanis (2014), yang menekankan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur kemandirian daerah dalam pembiayaan dan pembangunan
- Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, dana keuangan khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam APBN, yang bertujuan untuk membantu membiayai tindakan khusus sesuai dengan prioritas daerah dan nasional.

-
- Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Puput Purpitasari, 2015. Dampak Pendapatan Daerah dan Dana Penyaluran Umum Terhadap Penyaluran Daerah. Majalah. Sekolah Bisnis Indonesia Surabaya. Jurnal Analisis Bisnis Indonesia (IJBA).Tesis Marshanda Kasavina Putri "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dampaknya Terhadap Belanja Modal Pemprov Sumbar" Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Padang.
- Siti, D., Yusni, Y.L.S., Evi, F.T. dan Rosalia, P.S. dan Angelica, K.O.S. 2020. Dampak Pendapatan Primer Daerah, Dana Distribusi Umum, dan Dana Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Administratif Daerah/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Jilid 3. No.1
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Negara dan DaerahUU. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.Mardiasme 2012. Otonomi dan pengelolaan perekonomian daerah. Andi Penerbit : Yogyakarta.Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perekonomian Daerah.Priamudi, Wimpi. 2016. Dampak Pendapatan Awal Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Administratif Dan Kota Pulau Jawa. Disertasi. Program Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yulia, Lisa. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2014